

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan kolonial Belanda. Istilah preman sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, *freeman* (orang bebas) di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, *freeman* (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran).¹ Definisi lain menyebutkan bahwa preman adalah kelompok masyarakat kriminal, mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti percaloan, pemerasan, pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan.²

Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan di sini bisa berbentuk materi dan juga ketidak-sesuaian sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat, tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur

¹ Ida Bagus Pujaastawa dalam Ali Mustofa Akbar. 2011. *Premanisme Dalam Teori Labeling*. <http://www.erasuslim.com> Hal 4

² Rahmawati, L. 2002. *Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi)*. Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa. Hal 14

masyarakat tertentu. Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat dan kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat.

Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi-aksi premanisme dewasa ini semakin meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya. . Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi. Sebagai ilustrasi dapat dipaparkan dalam bab ini aksi premanisme di terminal bus adalah memungut pungutan liar dari sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal. Preman di pasar memungut pungutan liar dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap rusaknya lapak yang bersangkutan.

Dalam hal memperebutkan wilayah kekuasaan para preman sering melakukan kekerasan terhadap preman yang lain sehingga terjadilah peristiwa hukum seperti penganiayaan yang bisa berakibat luka atau matinya orang. Kekerasan itu terjadi dipicu dengan adanya target dari bos preman yang sering diistilahkan dengan “mengejar setoran”

Peristiwa hukum yang dilakukan oleh para preman ini pada umumnya menurut hukum pidana perbuatannya dapat dikategorikan ke dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365), pemerasan (368 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285), penganiayaan (Pasal 351), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (Pasal 170) bahkan juga sampai melakukan pembunuhan (Pasal 338) ataupun pembunuhan berencana (Pasal 340), perilaku Mabuk dimuka umum (Pasal 492), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sesuai dengan amanat undang-undang Dasar 1945 maka tugas aparat Negara penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang didasarkan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 berbunyi; “dalam mengemban Tugasnya Kepolisian mempunyai Tugas Pokok:³

- a. Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakan hukum,
- c. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di masyarakat. Secara garis besar tugas polisi memang untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Akan tetapi akhir-akhir ini premanisme begitu marak di Indonesia khususnya di kota-kota kecil, salah satunya yaitu Kabupaten Karanganyar. Dengan adanya aksi preman ini maka

³ UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

masyarakat merasa tidak nyaman dan resah. Dengan kata lain premanisme yang ada di Karanganyar membuat masyarakat sangat tidak aman. Adanya keadaan seperti ini Polres Karanganyar tidak bisa berdiam diri. Mereka akan melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan hal inilah, maka menarik untuk dikaji permasalahan penanganan premanisme oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan tugas dan kewenangannya yang terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di Karanganyar.

Preman pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Preman yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang sejenis, hanya diberi pengarahan dan pembinaan. Setelah dibina, preman-preman tersebut dilepaskan, tanpa memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi preman-preman tersebut. Setelah dilepaskan, preman-preman itu akan mengulangi kembali perbuatannya, ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan kembali.

Namun demikian kejahatan adalah kenyataan yang normal dan perlu dalam masyarakat. Kejahatan bukanlah sesuatu yang abnormal, patologis atau kurang sempurna manusia.⁴

⁴ Koentjoro. 2011. *Kriminologi Dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Yogyakarta: BP UGM. Hal. 11

Aksi premanisme yang semakin meresahkan mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula yang tepat dan dapat mengatasi preman. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mendeskripsikan peran polri dalam penanggulangan premanisme.

Dalam menertibkan premanisme, Polri tidak boleh melakukan kekuatan yang berlebihan dan harus mengacu pada aturan ketat penggunaan kekuatan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai upaya penanggulangan premanisme yang ditempuh oleh Polres Karanganyar. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul: "PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI PREMANISME DI KARANGANYAR "

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk premanisme yang terjadi di Karanganyar?
2. Bagaimanakah peran polri dalam menanggulangi terjadinya premanisme di Karanganyar sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?

3. Faktor positif yang mendukung dan faktor negatif yang menghambat Polri dalam menanggulangi premanisme di Karanganyar?

C. Tinjauan Kepustakaan

1. Premanisme

Istilah preman berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, *freeman* (orang bebas) di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu.⁵

Preman adalah orang/individu dan atau kelompok orang yang tidak berpenghasilan tetap, tidak punya pekerjaan yang pasti, mereka hidup atas dukungan orang-orang yang terkena pengaruh keberadaannya. Karena tidak bekerja dan harus bertahan hidup, mulanya mereka berbuat apa saja yang dapat menghasilkan uang, namun karena dia melihat ada orang-orang penakut yang dapat dimintai uang, mereka juga melakukan penekanan fisik maupun psikis, agar mereka mau mendukung kebutuhannya. Sikap, tindakan, perilaku para preman itulah yang disebut sebagai premanisme.⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2 yang diterbitkan Balai Pustaka (1993) memberi arti preman dalam level pertama. Kamus ini menaruh "preman" dalam dua entri: (1) preman dalam arti partikelir, bukan tentara atau sipil, kepunyaan sendiri; dan (2) preman sebagai

⁵ Ida Bagus Pujaastawa, *Op.Cit.* Hal. 5

⁶ Kunarto. *Kejahatan Berdimensi Baru*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1999. Hal: 252

sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, dan lain-lain). Dalam level kedua, yakni sebagai cara kerja, preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Di sini, preman merupakan sebuah tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban moral. Maka premanisme di sini merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan. Istilah preman penekanannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang lain.⁷

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane, setidaknya ada empat model preman yang ada di Indonesia, yaitu :

- a. Preman yang tidak terorganisasi. Mereka bekerja secara sendiri-sendiri, atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas;
- b. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan;
- c. Preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan;
- d. Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi⁸

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Edisi ke-2. 1993. Hal. 744

⁸ Neta S. Pane. 2011. *Model-Model Premanisme Modern*. Presidium Indonesia Police Watch. <http://eep.saefulloh.fatah.tripod.com>. Hal. 10

2. Kepolisian Republik Indonesia sebagai Aparatur Hukum

Pasal 12 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan ‘Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Kepolisian mencegah dan menekan dalam rangka *Criminal Justice System*. Polri adalah alat negara yang melaksanakan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Polri berkedudukan langsung dibawah presiden dimana Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.”

Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan Polri dalam pasal 4 dijelaskan: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Menurut Suparlan (1999) fungsi polisi adalah sebagai berikut:

- a. Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan

antara individu, masyarakat, dan negara (yang diwakili oleh pemerintah) dan antar individu serta antar masyarakat;

- b. Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan negara;
- c. Mengayomi warga masyarakat, masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan.⁹

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk premanisme yang terjadi di Karanganyar
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis peran polri dalam menanggulangi terjadinya premanisme di Karanganyar sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Polri dalam menanggulangi premanisme di Karanganyar

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Yaitu bermanfaat bagi masyarakat dan penulis sendiri untuk menambah ilmu pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan penelitian, serta dapat

⁹ Suparlan. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004. Hal. 29

menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan agar para penegak hukum pada khususnya dapat lebih memaksimalkan dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh preman.

E. Kerangka Pemikiran

Praktek premanisme dewasa ini tumbuh di berbagai daerah dan di berbagai lini kehidupan manusia. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan, kolonial Belanda, selain bertindak sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan.

Aksi preman pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Preman yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang sejenis, hanya diberi pengarahan dan pembinaan. Setelah dibina, preman-preman tersebut dilepaskan, tanpa memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi preman-

preman tersebut. Setelah dilepaskan, preman-preman itu akan mengulangi kembali perbuatannya, ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan kembali. Demikianlah siklus pemberantasan preman di Indonesia sekarang ini yang tidak kunjung henti.

Untuk itu merupakan tugas aparat penegak hukum dalam hal ini Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Polri tugas pokoknya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena- fenomena preman di masyarakat. Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi preman yang terjadi di sekeliling mereka, sehingga ke depan masyarakat dapat hidup tentram dan damai.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni berusaha mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh aparat kepolisian di daerah. Penelitian deskriptif menyajikan data-data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam penanggulangan aksi premanisme.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normative empiris yakni dengan mengidentifikasi kajian normative mengenai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melihat keadaan riil yang terjadi mengenai penerapannya di lapangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Polres Karanganyar yang selama ini sering berhadapan dengan beberapa kejadian aksi premanisme di Kabupaten Karanganyar yang menurut statistik kriminal di tahun sebelumnya atau tahun 2013 ke bawah menunjukkan adanya peningkatan aksi premanisme di Kabupaten Karanganyar.

4. Data dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang objektif, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan sampel yaitu petugas kepolisian di Polres Karanganyar. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka responden yang dijadikan sampel adalah Kapolres Karanganyar, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Karanganyar, dan anggota kepolisian di Polres Karanganyar

Data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara, dalam hal ini akan dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya namun tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pertanyaan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian empiris atau yuridis sosiologis, sebab menggunakan data primer yang diperoleh dari anggota polisi di lingkungan Polres Karanganyar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang siap pakai yang dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang –

undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum. Bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data-data tentang:

- a. Aksi-aksi premanisme yang pernah terjadi di Kabupaten Karanganyar
- b. Tindakan polisi dalam menanggulangi aksi premanisme yang terjadi di Kabupaten Karanganyar
- c. Peraturan perundangan yang digunakan polisi dalam menanggulangi aksi premanisme yang terjadi di Kabupaten Karanganyar
- d. Tanggapan polisi terhadap upaya penanggulangan aksi premanisme yang terjadi di Kabupaten Karanganyar

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, studi pustaka, dokumentasi dan wawancara dengan anggota kepolisian di lingkungan Polres Karanganyar. Observasi secara langsung dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap sumber data, berupa surat-

surat Keputusan, peraturan-peraturan Pemerintah serta berkas-berkas (arsip) yang diperoleh dari lokasi penelitian.¹¹

Penelitian kepustakaan ini dilakukan guna memperoleh data sekunder, yaitu penelitian bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku-buku tentang Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan masalah Premanisme, kejahatan, dan kriminalistik.

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹² Wawancara adalah tanya jawab secara langsung (bertemu muka) dengan responden untuk mendapatkan jawaban atau data yang diperlukan. Moleong (2007) menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara ini dimaksudkan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.¹³

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3)

¹¹ Sutrisno, H. 1983. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta. Hal. 71

¹² *Ibid.* Hal. 81

¹³ Lexy J Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 167

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.¹⁴

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai upaya-upaya kepolisian dalam memberantas aksi premanisme. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan anggota kepolisian dan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan.

¹⁴ Ibid. Hal. 179

7. Sistematika Penulisan

Agar skripsi dapat tersusun sesuai apa yang dikehendaki penulis, maka penulis memberikan sistematika sebagai berikut : Didalam bab pertama pendahuluan, penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai penulisan hukum yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan hokum. Kemudian lanjut ke bab kedua, penulis akan menguraikan mengenai Kepolisian Republik Indonesia dan tentang Premanisme. dan Pada bab ketiga, penulis akan menyajikan hasil penelitian disertai dengan pembahasan mengenai Bentuk-bentuk premanisme yang terjadi di Karanganyar, faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Polri dalam menanggulangi premanisme di Karanganyar dan bagaimanakah upaya polri dalam menanggulangi terjadinya premanisme di Karanganyar. Terakhir pada bab keempat berisi simpulan dan saran berdasarkan analisa dari data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap pembahasan. untuk menuju perbaikan sehingga bermanfaat bagi semua pihak.